



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

Jl. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) Telp. (0265) 342610

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2017 dapat selesai sesuai target waktu yang direncanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKIP sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan memberi panduan bagi evaluator untuk :

1. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
2. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;



3. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
4. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya;
5. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana;
6. Menjadi bahan acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;

Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan atau Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya dan pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2017 dapat direalisasikan dengan baik.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan namun, demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja pemerintah Kota Tasikmalaya dengan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan



akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel di mata instansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Tasikmalaya, Januari 2018

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,



Drs. H. OSLAN KHAERUL FALAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611013 198206 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Gambaran Umum Organisasi
- 1.4. Permasalahan Utama

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Indikator Kinerja Utama
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Terselenggaranya *good governance* dan *clean government* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintah, disamping itu juga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga merupakan media untuk mengetahui apakah dana pemerintah sudah dikelola secara tepat, apakah program dan kegiatan dapat mencapai tujuan sesuai otorisasi dari dana yang diberikan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam [Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah](#) yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum



Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;



15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 -2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 - 2017;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
24. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota



Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut, kemudian dijabarkan oleh Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya.

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
2. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- 3. Bidang Perpustakaan , membawahkan :
 - a. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - b. Seksi Layanan Perpustakaan;
 - c. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca
- 4. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - b. Seksi Pengelolaan Arsip Statis;
 - c. Seksi Pembinaan Kearsipan
- 5. UPT Dinas;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.3 Komposisi Pegawai

Sumber Daya Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, baik secara kuantitas maupun kualitas dapat dilihat dari tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan Ruang	L	P	Jumlah
1	Pembina Utama Madya/ IV.d	-	-	-
2	Pembina Utama Muda/ IV.c	1	-	1
3	Pembina Tk. I/ IV.b	1	-	1
4	Pembina/ IV.a	2	-	2
5	Penata Tk. I/ III.d	6	4	10
6	Penata/ III.c	1	-	1
7	Penata Muda Tk. I/ III.b	-	1	1
8	Penata Muda/ III.a	-	-	-
9	Pengatur Tk. I/ II.d	1	1	2
10	Pengatur/ II.c	1	-	1
11	Pengatur Muda Tk. I/ II.b	4	1	5
12	Pengatur Muda/ II.a	-	-	-
13	Juru Tk. I/ I.d	-	-	-
14	Juru/ I.c	-	-	-



15	Juru Muda Tk. I/ I.b	-	-	-
16	Juru Muda/ I.a	-	-	-
	Jumlah	17	7	24



Tabel. 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan Struktural/ Eselon								Jabatan Fungsional Tertentu		Jabatan Fungsional Umum		Jmlh
	II.b		III.a		III.b		IV.a		L	P	L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P					
1	1	-	1	-	2	-	5	3	2	1	6	3	24

Tabel. 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S-3	-	-	-
2	S-2	5	-	5
3	S-1	5	4	9
4	D IV	-	-	-
5	D III	2	2	4
6	D II	-	-	-
7	D I	-	-	-
8	SMA/Sederajat	5	1	6
9	SMP/Sederajat	-	-	-
10	SD	-	-	-
	Jumlah	17	7	24

1.3.4 Aspek Pelayanan Teknis Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan

Berdasarkan muatan uraian tugas pokok dan rincian tugas unit, dalam penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, dirangkum dalam indikator kinerja dan manajemen kantor :

1. Layanan mobil perpustakaan keliling;
2. Lomba minat baca (*story telling*) dan lomba peningkatan minat baca sesuai jadwal;
3. Layanan sirkulasi dan keanggotaan perpustakaan secara gratis;



4. Layanan referensi dan multimedia;
5. Layanan perpustakaan digital dan internet;
6. Layanan perpustakaan diluar jam kerja;
7. Wisata buku;
8. Bimbingan bagi pemustaka;
9. Layanan terbitan berkala;
10. Pemeliharaan program aplikasi perpustakaan;
11. Bedah buku dan alih media *local content*;
12. Sosialisasi peningkatan budaya baca;
13. Peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standart bagi SDM perpustakaan;
14. Monev perpustakaan;
15. Pendataan perpustakaan masyarakat/komunitas;
16. Layanan informasi dan konsultasi kearsipan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, Ormas, Orpol, Perusahaan swasta, dan perseorangan;
17. Layanan jasa pembenahan dan penataan arsip bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, Ormas, Orpol, Perusahaan swasta, dan perseorangan;
18. Layanan jasa penyimpanan dan pemeliharaan arsip bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, Ormas, Orpol, Perusahaan swasta, dan perseorangan;
19. Layanan jasa kearsipan dengan Instansi Provinsi, Kabupaten/Kota, Pihak ketiga agar terjalin kerjasama yang baik;
20. Pendataan dan penataan arsip inaktif daerah, pengolahan arsip kacau serta promosi wisata arsip (entertain dan edukasi);
21. Fasilitasi permintaan materi kearsipan dalam kediklatan berdasarkan pedoman;
22. Fasilitasi penyiapan bahan arsip dan mengkaji permintaan data dan informasi untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya;



23. Dokumentasi naskah peraturan perundang-undangan tentang layanan kearsipan di lingkungan Pemerintah, Swasta, Perorangan, dan Masyarakat;
24. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian naskah sumber arsip konvensional dan naskah baru sebagai bahan informasi bagi pengguna jasa arsip;
25. Mengadakan pemilihan/seleksi terhadap naskah-naskah sumber arsip yang akan dipublikasikan sebagai layanan informasi;
26. Fasilitasi penyusunan rumusan/rancangan kebijakan kearsipan, monev kearsipan, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan;
27. Fasilitasi pengembangan kearsipan daerah, penelusuran arsip bersejarah dan penyusunan citra daerah;
28. Melakukan penyelamatan arsip daerah melalui fumigasi dan *termite control*;
29. Penyelamatan arsip daerah melalui alih media;
30. Penyusunan rencana program kerja sekretariat dan bidang;
31. Pelaksanaan ketatausahaan dan pengurusan kerumahtanggaan dinas;
32. Pengelolaan barang milik daerah dan kepegawaian lingkungan dinas;
33. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
34. Penyusunan data statistik yang berhubungan dengan bidang perpustakaan dan kearsipan;
35. Penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang perpustakaan dan kearsipan;
36. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
37. Penyusunan rencana anggaran, pembinaan serta penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;



38. Pelaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan keseluruhan tugas, pokok dan fungsi dinas.

1.4. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok sebagai perangkat daerah yang menjalankan misi besar berkenaan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pembudayaan kegemaran membaca/literasi masyarakat dan peningkatan jumlah dan jenis koleksi perpustakaan dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat;
2. Percepatan dan pemerataan pelayanan perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya;
3. Peningkatan penyelenggaraan kearsipan dan pelestarian, perlindungan dan pengamanan arsip sesuai standar baku, di seluruh Perangkat Daerah;
4. Penyelarasan tata letak strategis gedung perpustakaan dan depo arsip serta peningkatan sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan dalam meningkatkan kinerja dan layanan;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia keperpustakaan dan kearsipan menuju tenaga kompeten, profesional dan terampil;
6. Implementasi, integrasi serta pengembangan fasilitas perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta sesuai kondisi kekinian



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), analisis terhadap unsur-unsur tersebut penting dan merupakan dasar bagi perumusan visi, misi dan strategi organisasi. Dengan mengadakan analisis lingkungan internal dan eksternal diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran kemampuan organisasi tentang posisi kekuatan organisasi yang meliputi faktor pendorong dan faktor penghambat, oleh karena itu perwujudan rencana strategis ini dibentuk dengan berbagai alasan diantaranya:

1. Adanya penataan dan perubahan strategi organisasi dalam lingkungan yang semakin kompleks;
2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia;
3. Merumuskan strategi pelaksanaan pelayanan prima (*service excellence*) sesuai dengan tugas dan tanggungjawab organisasi;
4. Menciptakan kondisi lingkungan organisasi yang memberikan apresiasi pada kinerja.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017 adalah “**Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani**”. Untuk mencapai Visi Kota Tasikmalaya tersebut, maka dirumuskan **Misi** :



1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan menciptakan peningkatan ketaatan dan kesalehan sosial masyarakat;
2. Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan suprastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengembangan budaya lokal.

Dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga memiliki sinkronisasi dan harmonisasi yang tinggi dalam pencapaian **Misi Ketiga** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017, yaitu Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengembangan budaya lokal.

Maka ditetapkan Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017, yaitu :

“TERDEPAN DALAM PENYEDIAAN INFORMASI”

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan Misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Adapun Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya sebagai berikut

1. Mewujudkan Layanan Perpustakaan yang Unggul;



2. Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan dan Pelayanan Kepada Masyarakat mencapai Terwujudnya Kinerja Yang Akuntabel.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, teratur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi Misi Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya dilakukan rumusan dari lahirnya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta perubahan kondisi status dan nomenklatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebelumnya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melalui penetapan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tahun 2017 berikut visi dan misinya, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan pula tujuan sebagai berikut :



Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kota Tasikmalaya

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran		Target Akhir Renstra
						2015	2016	2017	2018	
1	Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat	Peningkatan pengunjung perpustakaan	Peningkatan pengunjung perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	-	-	7,38	8	8
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Kearsipan	Penerapan standar baku kearsipan	Penerapan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	%	-	-	15	20	20
3	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Menuju Terwujudnya Kinerja Yang Akuntabel	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori	-	-	B	B	B
				Nilai Evaluasi AKIP	Kategori	-	-	CC	CC	CC
	Tindak Lanjut Temuan BPK/Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti		%	-	-	75	80	80	



2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2017 :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3
1	Peningkatan pengunjung perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan
2	Penerapan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar baku kearsipan
3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Capaian IKM perangkat daerah
		Nilai Evaluasi AKIP
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan



yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2017 mengacu kepada dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017, dengan dokumen rencana kerja (Renja) tahun 2017, dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun 2017, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Penetapan Kinerja tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Peningkatan pengunjung perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	7,38%
Penerapan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	15%
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Capaian IKM perangkat daerah	B
	Nilai Evaluasi AKIP	CC
	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	75%

2.4. Perencanaan Anggaran Tahun 2017

Dari tiga sasaran dengan indikator yang diperjanjikan, didukung oleh sebelas program dan empat puluh empat kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dan ditunjang oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.637.563.344,-, dengan rincian program dan kegiatan sebagaimana Tabel berikut :



Tabel 2.4

Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2017

Misi 1: Mewujudkan Layanan Perpustakaan yang Unggul;								
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2017				Anggaran Rp.	
			Satuan	Target	Program	Kegiatan		
Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat	Peningkatan pengunjung perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	persen	7,38	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	30.000.000
					Program Pengembangan Sarana / Prasarana Perpustakaan	2	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	180.000.000
						3	Pengembangan Perpustakaan di Kota Tasikmalaya	200.000.000
						4	Pengembangan Perpustakaan Pemerintah Daerah di Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017)	3.500.000.000
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan dan Pelayanan Kepada Masyarakat mencapai Terwujudnya Kinerja Yang Akuntabel								
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2017				Anggaran Rp.	
			Satuan	Target	Program	Kegiatan		
Meningkatkan Penyelenggaraan Kearsipan	Penerapan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	persen	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	5	Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan	70.000.000
						6	Penyusunan Rancangan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	31.000.000
						7	Penataan arsip in aktif	35.000.000
						8	Pembinaan kearsipan	90.000.000
					9	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Pembuatan Film Dokumenter Sejarah Kebangkitan Pergerakan di Kota Tasikmalaya 1912 -1926	100.000.000



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2017					Anggaran Rp.
			Satuan	Target	Program	Kegiatan		
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Capaian IKM perangkat daerah	kategori	B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
						11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000
						12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000
						13	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	5.000.000
						14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.000.000
						15	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60.000.000
						16	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000
						17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000
						18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000
						19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000
						20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000
						21	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000
	22	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	201.000.000					
	23	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	86.400.000					
	24	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	29.850.000					
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	25	Pengadaan Mobil Jabatan	535.000.000



					Aparatur			
						26	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	79.000.000
						27	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000
						28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000
						29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	100.000.000
						30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	89.486.000
						31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000
						32	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	35.000.000
						33	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	25.650.000
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34	Pengadaan mesin/kartu absensi	15.000.000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	53.800.000
		Nilai Evaluasi AKIP	kategori	CC	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat	2.500.000
					Program Perencanaan Kerja	37	Penyusunan Rencana Kerja	2.500.000
						38	Penyusunan Rencana Strategis	15.000.000
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	39	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Arsip dan Perpustakaan	12.550.000



						40	Sinergitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah dinas perpustakaan dan kearsipan daerah	30.000.000
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	persen	75	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.500.000
						42	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.500.000
						43	Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran	2.500.000
						44	Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun	2.500.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Tasikmalaya.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.



Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program dan kegiatan yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang dicapai atau realisasi kinerja. Pengukuran kinerja kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya yaitu menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya, sedangkan data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya.

Pengumpulan data capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode selesainya seluruh program/kegiatan dalam rangka mengukur keberhasilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Pengukuran Kinerja mencakup :

1. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan tingkat keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rentang Nilai Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Warna	Persentase	Keterangan
1.		n/a	Tidak Ada Target
2.		< 100%	Tidak Tercapai
3.		= 100%	Sesuai Target
4.		> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% (>100%) dikategorikan berada pada angka capaian kinerja MELEBIHI TARGET diberikan indikator warna Biru. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai sama dengan 100% (=100%) termasuk pada angka capaian kinerja SESUAI TARGET dan diberikan warna Hijau. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100% (<100%) termasuk pada angka capaian kinerja TARGET TIDAK TERCAPAI diberikan warna Merah. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi



pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

3.2.1 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2017, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran pertama : Peningkatan pengunjung perpustakaan

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran peningkatan pengunjung perpustakaan dengan indikator persentase peningkatan pengunjung perpustakaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa persentase pemustaka pertahun di Kota Tasikmalaya mencapai berapa persen dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk Kota Tasikmalaya usia 10-58 tahun.

Pencapaian peningkatan pengunjung perpustakaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Peningkatan Pengunjung Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		Capaian %	Tahun 2016		Capaian %	Tahun 2017		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pengunjung Perpustakaan	%	5,77	5,85	101,38	6,58	7,24	110	7,38	7,85	106,50
Rata-rata Capaian IKU			101,38			110			106,50		
Kinerja Capaian Sasaran			101,38			110			106,50		



Tabel diatas memperlihatkan capaian kinerja nyata sebesar **106,50%** dari target 100%. Pada tahun 2017 jumlah pemustaka sebanyak 40.685 dari total populasi penduduk Kota Tasikmalaya Usia 10-58 Tahun sebanyak 517.621 orang. Jumlah pemustaka naik 0,47% atau sebanyak 2.432 orang dari target sebanyak 7,38% atau 38.200 pemustaka sehingga dapat dikategorikan **Melebihi Target**.

Adapun pendataan terhadap pemustaka kami akumulasikan dari berbagai sumber seperti :

1. Data pemustaka yang datang langsung ke Gedung Perpustakaan Umum Daerah yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) melalui layanan harian dan ekstra hari sabtu;
2. Kegiatan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah, rekap data pengunjung perpustakaan ke Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan serta TBM di Kota Tasikmalaya;
3. *Moment* kunjungan ke pusat keramaian seperti sesi *Car Free Day*, ke Taman Kota dan Kawasan Tempat Olahraga Dadaha Tasikmalaya.

Bila dilihat perbandingan realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 1

Tahun 2017 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017		Capaian %	Rencana sesuai dengan Renstra/Renja Tahun 2017		Capaian %	Tahun 2018		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pengunjung Perpustakaan	%	7,38	7,85	106,50	7,38	7,85	106,50	8	7,85	98,13

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan rencana awal Renstra tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja



106,50%, sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2017, indikator persentase pengunjung perpustakaan menunjukkan capaian sebesar 98,13% target renstra 2017.

Dalam pengukuran capaian sasaran peningkatan pengunjung perpustakaan terdapat pencapaian kinerja yang melebihi target, hal tersebut dikarenakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya melalui Bidang Perpustakaan secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan utamanya di tahun 2017, diantaranya :

1. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, capaian kinerja publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca bagi 100 orang pemustaka;
2. Pengembangan perpustakaan pemerintah daerah di Kota Tasikmalaya, capaian kinerja berupa bantuan rak buku dan buku/kepustakaan bagi 46 OPD dan puskesmas;
3. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, capaian kinerja berupa tambahan koleksi 5 paket buku perpustakaan;
4. Pengembangan perpustakaan di Kota Tasikmalaya, capaian kinerja berupa koleksi baru 1 paket Buku/Kepustakaan.

Namun demikian pada pelaksanaan sasaran peningkatan pengunjung perpustakaan terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, berikut disampaikan beberapa masalah, pemecahan dan faktor pendukung :

Faktor Pendukung	Permasalahan	Rekomendasi/Solusi
1. Terdapatnya sarana mobilitas yakni mobil perpustakaan keliling;	1. Rendahnya minat baca masyarakat Kota Tasikmalaya;	1. Perlu melakukan pelayanan perpustakaan lebih dekat kepada masyarakat melalui : Pusteling, Pusling, Library in the Boks, Car Free Day, Perpustakaan Rumah Ibadah/Pesantren dan Sekolah;
2. Adanya forum komunikasi literasi perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat;	2. Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan	2. Perlu dilakukan
3. Pemustaka		



		penambahan SDM pengelola perpustakaan
--	--	---------------------------------------

Sasaran kedua : Penerapan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran penerapan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah dengan indikator persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan dimaksudkan untuk memberikan gambaran seberapa besar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menerapkan pengelolaan arsip secara baku yang sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku, dilihat dari :

1. Pengelolaan naskah dinas sesuai dengan Perwalkot tentang Tata Naskah Dinas;
2. Pengelolaan Arsip Dinamis berdasarkan Perwalkot tentang Tata Kearsipan;
3. Memiliki tenaga pengelola kearsipan berupa arsiparis dan atau tenaga pengelola yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan/pembinaan kearsipan;
4. Memiliki unit kearsipan berupa sebuah ruangan khusus untuk menyimpan arsip aktif dan in-aktif.

Pencapaian penerapan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Penerapan Standar Baku Kearsipan Pada Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		Capaian %	Tahun 2016		Capaian %	Tahun 2017		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	%	-	-	-	-	-	-	15	42,5	283,33
Rata-rata Capaian IKU			-			-			283,33		
Kinerja Capaian Sasaran			-			-			283,33		

Dari Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya sebagaimana daftar :

1. Sekretariat Daerah;
11. Dinas Sosial;
21. Satuan Polisi



2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Tenaga Kerja;
13. Dinas Pertanian dan Perikanan;
14. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
19. Dinas Komunikasi dan Informatika;
20. Dinas Ketahanan Pangan
- Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
22. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
26. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo;
27. Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika;
28. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

30. Kecamatan Cihideung, membawahkan :
 - a. Kelurahan Yudanagara;
 - b. Kelurahan Nagrarwangi;
 - c. Kelurahan Cilembang;
 - d. Kelurahan Argasari;
 - e. Kelurahan Tugujaya;
 - f. Kelurahan Tuguraja.
31. Kecamatan Cipedes, membawahkan :
 - a. Kelurahan Panglayungan;
 - b. Kelurahan Cipedes;
 - c. Kelurahan Nagarasari;
 - d. Kelurahan Sukamanah.
32. Kecamatan Tawang, membawahkan :
 - a. Kelurahan Tawangsari;
 - b. Kelurahan Empangsari;
 - c. Kelurahan Lengkongsari;
 - d. Kelurahan Cikalang;
 - e. Kelurahan Kahuripan.
33. Kecamatan Indihiang, membawahkan :
 - a. Kelurahan Indihiang;
 - b. Kelurahan Sirnagalih;
 - c. Kelurahan Parakannyasag;
 - d. Kelurahan Panyingkiran;
35. Kecamatan Cibeureum, membawahkan :
 - a. Kelurahan Setiaratu;
 - b. Kelurahan Ciherang;
 - c. Kelurahan Kersanagara;
 - d. Kelurahan Kota Baru;
 - e. Kelurahan Awipari;
 - f. Kelurahan Setianagara;
 - g. Kelurahan Ciakar;
 - h. Kelurahan Margabakti;
 - i. Kelurahan Setiajaya;
36. Kecamatan Tamansari, membawahkan :
 - a. Kelurahan Tamansari;
 - b. Kelurahan Mulyasari;
 - c. Kelurahan Mugarsari;
 - d. Kelurahan Tamanjaya;
 - e. Kelurahan Sukahurip;
 - f. Kelurahan Sumelap;
 - g. Kelurahan Setiawargi;
 - h. Kelurahan Setiamulya.
37. Kecamatan Mangkubumi, membawahkan :
 - a. Kelurahan Mangkubumi;
 - b. Kelurahan Cigantang;
 - c. Kelurahan Karikil;
 - d. Kelurahan Cipari;



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> e. Kelurahan Sukamaju Kaler; f. Kelurahan Sukamaju Kidul. | <ul style="list-style-type: none"> e. Kelurahan Linggajaya; f. Kelurahan Cipawitra; g. Kelurahan Sambongpari; h. Kelurahan Sambongjaya. |
| <p>34. Kecamatan Kawalu,
membawahkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Karsamenak; b. Kelurahan Cilamajang; c. Kelurahan Gunung Tandala; d. Kelurahan Urug; e. Kelurahan Tanjung; f. Kelurahan Cibeuti; g. Kelurahan Karang anyar; h. Kelurahan Talagasari; i. Kelurahan Leuwiliang; j. Kelurahan Gununggede. | <p>38. Kecamatan Bungursari,
membawahkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Sukamulya; b. Kelurahan Sukarindik; c. Kelurahan Bungursari; d. Kelurahan Sukajaya; e. Kelurahan Cibunigeulis; f. Kelurahan Bantarsari; g. Kelurahan Sukalaksana. |
| | <p>39. Kecamatan Purbaratu,
membawahkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Sukanagara; b. Kelurahan Sukamenak; c. Kelurahan Purbaratu; d. Kelurahan Sukaasih; e. Kelurahan Sukajaya; f. Kelurahan Singkup |

Termasuk di bawah pembinaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, yakni Puskesmas di Kota Tasikmalaya sebagaimana daftar :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1.UPTD Puskesmas Purbaratu; 2.UPTD Puskesmas Kawalu; 3.UPTD Puskesmas Tawang; 4.UPTD Puskesmas Kahuripan; 5.UPTD Puskesmas Tamansari; 6.UPTD Puskesmas Cibeureum; 7.UPTD Puskesmas Urug; 8.UPTD Puskesmas Bungursari; 9.UPTD Puskesmas Mangkubumi; 10. UPTD Puskesmas Sambongpari; | <ul style="list-style-type: none"> 11.UPTD Puskesmas Karanganyar; 12.UPTD Puskesmas Bantar; 13.UPTD Puskesmas Indihiang; 14.UPTD Puskesmas Parakannyasag; 15.UPTD Puskesmas Cipedes; 16.UPTD Puskesmas Cigeureung; 17.UPTD Puskesmas Panglayungan; 18.UPTD Puskesmas Cihideung; 19.UPTD Puskesmas Cilembang. |
|---|---|

Kembali ke bahasan, dari tabel diatas dapat dijelaskan :

1. Pada tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan dengan perhitungan pembilang berdasarkan pembentukan Perangkat Daerah baru di Kota Tasikmalaya termasuk unit kerja di bawah pembinaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Capaian kinerja untuk sasaran penerapan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah menunjukkan capaian kinerja nyata sebesar 42,5% (283,33%) dari target yang diperjanjikan sebesar 15% sehingga dapat dikategorikan **Melebihi Target;**



3. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah Perangkat Daerah berikut unit kerja binaan yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku sebanyak 54 Perangkat Daerah berikut unit kerja binaan di persentasekan terhadap Jumlah Perangkat Daerah berikut unit kerja binaan di Kota Tasikmalaya sebanyak 127 Perangkat Daerah berikut unit kerja binaan.

Jika diperbandingkan dengan Realisasi pencapaian sasaran 2 sampai dengan tahun awal sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 2

Tahun 2017 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana sesuai dengan Renstra/Renja Tahun 2017		Capaian %	Tahun 2018		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	%	15	42,5	283,33	20	42,5	212,5

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan rencana awal Renstra 2017 menunjukkan capaian kinerja Prosentase Jumlah Perangkat Daerah berikut unit kerja binaan yang menerapkan standar baku kearsipan mencapai 283,33%, sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2018, indikator Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan telah mencapai **212.5%**.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah Perangkat Daerah berikut unit kerja binaan yang menerapkan standar baku kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melalui Bidang Kearsipan telah melaksanakan serangkaian kegiatan, utamanya di tahun 2017 diantaranya :



1. Penataan arsip in aktif, realisasi keuangan 91,74% dan capaian kinerja arsip in aktif yang tertata melalui 1 kali kegiatan;
2. Pembuatan film dokumenter sejarah kebangkitan pergerakan di Kota Tasikmalaya 1912 -1926, realisasi keuangan 97,23% dan capaian kinerja 1 (satu) Film Dokumenter Sejarah Kebangkitan Pergerakan di Kota Tasikmalaya 1912 -1926 dalam 30 menit;
3. Pembinaan kearsipan, realisasi keuangan 97,94% dan capaian kinerja pembinaan kearsipan dalam 1 kegiatan;
4. Penyusunan rancangan klasifikasi keamanan dan akses arsip, realisasi keuangan 99,21% dan capaian kinerja terancangnya klasifikasi keamanan dan akses arsip melalui 1 kali kegiatan;
5. Bimbingan teknis pengelola kearsipan, realisasi keuangan 99,68% dan capaian kinerja pembinaan kearsipan terhadap arsiparis dan pengelola kearsipan PD melalui 1 kali kegiatan.

Namun demikian pada pelaksanaan sasaran penerapan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, berikut disampaikan beberapa faktor pendukung, masalah, dan solusi :

Faktor Pendukung	Permasalahan	Rekomendasi/Solusi
1. Adanya kegiatan bimbingan teknis pengelola kearsipan setiap tahunnya;	1. Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip;	1. Mengikutsertakan para pengelola arsip Perangkat Daerah dan unit kerja binaan pada bimbingan teknis pengelola kearsipan;
2. Adanya pelaksanaan pembinaan kearsipan secara terjadwal;	2. Belum adanya arsiparis/petugas khusus pengelola kearsipan pada Perangkat Daerah dan unit kerja binaan;	2. Mengangkat tenaga teknis kearsipan pada Perangkat Daerah dan unit kerja binaan;
	3. Belum adanya anggaran untuk pengadaan/peningkatan sarana kearsipan	3. Menganggarkan untuk kebutuhan sarana kearsipan Perangkat Daerah dan unit kerja binaan



Sasaran ketiga : Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah diidentifikasi melalui 3 (tiga) indikator kinerja :

1. Capaian IKM perangkat daerah;
2. Nilai Evaluasi AKIP;
3. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.

Pengukuran terhadap sasaran ketiga dengan indikator Capaian IKM perangkat daerah, sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya sebagai lembaga pelayanan publik, berorientasi pada kepuasan masyarakat/pelanggan melalui pengukuran kepuasan pelayanan.

Pencapaian indikator kinerja utama Capaian IKM perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 3
IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		Capaian %	Tahun 2016		Capaian %	Tahun 2017		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3.a	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan	Kategori	-	-	-	-	-	-	B	B	100
3.b	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan	Kategori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian IKU			-			-			100		
Kinerja Capaian Sasaran			-			-			100		

Tabel diatas memperlihatkan bahwa :

1. Pada tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan dan Kearsipan karena tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Capaian kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan menunjukkan capaian kinerja nyata



sebesar 100% (B) dari target yang diperjanjikan sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **Target Tercapai**;

3. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui Survey dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengunjung perpustakaan di Kota Tasikmalaya, selanjutnya masyarakat menilai dan mengukur kualitas pelayanan Dipusipda Kota Tasikmalaya berdasarkan persepsi masyarakat selaku pengguna jasa layanan publik;

4. Langkah-langkah penyusunan IKM :

a. Persiapan, meliputi penetapan *pelaksanaan* yang dilaksanakan oleh unit independent, *penyiapan bahan* berupa kuesioner serta alat yang digunakan, *penetapan responden* jumlah responden minimal 150 orang dari jumlah populasi penerimaan layanan dengan dasar ("Jumlah unsur" + 1) x 10 = Jumlah. Jadi Responden (14 + 1) x 10 = 150 orang (kategori data analysis oleh Freeman), *Penentuan Lokasi* yaitu di Dipusipda Kota Tasikmalaya;

b. Pelaksanaan Pengumpulan Data, meliputi *pengumpulan data* terhadap 14 unsur pelayanan yang telah ditetapkan, kemudian melakukan *pengisian kuesioner* oleh unit pelayanan selanjutnya dikumpulkan untuk dilaksanakan pengolahan/tabulasi;

c. Pengolahan Data, *Metode pengolahan* yaitu :

Bobot nilai rata2 tertimbang = Jml bobot/Jml unsur = $1/14 = 0.071$ IKM = total nilai persepsi per unsur x nilai penimbang/Total unsur yang terisi.

Interprestasi nilai IKM yaitu antara 25-100 makan hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

IKM unit pelayanan x 25 atau IKM unit pelayanan = Nilai IKM/4 x 100.

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan



Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

**Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang
Pelayanan Perpustakaan**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Prosedur pelayanan	3,17	B	Baik
U2	Persyaratan pelayanan	2,93	B	Baik
U3	Kejelasan petugas pelayanan	2,90	B	Baik
U4	Kedisiplinan petugas pelayanan	2,73	B	Baik
U5	Tanggung jawab petugas pelayanan	2,73	B	Baik
U6	Kemampuan petugas pelayanan	2,90	B	Baik
U7	Kecepatan pelayanan	2,87	B	Baik
U8	Keadilan mendapatkan pelayanan	2,87	B	Baik
U9	Kesopanan dan keramahan petugas	2,87	B	Baik
U10	Kewajaran biaya pelayanan	2,97	B	Baik
U11	Kepatian biaya pelayanan	2,80	B	Baik
U12	Kepastian jadwal pelayanan	2,83	B	Baik
U13	Kenyamanan lingkungan	2,83	B	Baik
U14	Keamanan pelayanan	2,63	B	Baik
Rata-rata pelayanan		2,86		
Hasil Konversi Nilai		71,49	B	Baik

d. Dari hasil penilaian IKM diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil survey IKM periode tahun 2017 yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya sebesar 71,49. Berdasarkan Standar Nilai yang ditetapkan oleh Kem.Men.Pan. Rb, maka Mutu Pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya menurut Masyarakat adalah pada kategori **B** atau **Baik**.

Perbandingan Nilai Mutu Pelayanan dengan Kinerja
Dipusipda Kota Tasikmalaya Tahun 2017

No	Nilai Interval	Mutu	Kinerja Dipusipda
----	----------------	------	-------------------



		Pelayanan	
1	25 - 43,75	Tidak Baik	Target : B Realisasi : 71,49 (Baik) Capaian IKU : 100%
2	43,76 - 62,50	Kurang Baik	
3	62,51 - 81,25	Baik	
4	81,26 - 100,00	Sangat Baik	

Jika diperbandingkan dengan Realisasi pencapaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan sampai dengan tahun awal sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :



Tabel 3.7

**Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 3
IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
Tahun 2017 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam
Dokumen Renstra**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana sesuai dengan Renstra/Renja Tahun 2017		Capaian %	Tahun 2018		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan	Kategori	B	B	100	B	B	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan rencana awal Renstra pada tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan mencapai 100%, sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2018, indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan telah mencapai **100%**. Dalam pelaksanaan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, berikut disampaikan beberapa faktor pendukung, masalah, dan solusi :

Faktor Pendukung	Permasalahan	Rekomendasi/Solusi
1. Adanya Hasil Survey (Kuesioner); 2. Adanya Masyarakat; 3. Adanya SDM	1. Hasil Survey (kuesioner) sering tidak terkumpul kembali; 2. Dalam pengisian sering tidak objektif; 3. Pengukuran IKM belum bersifat automasi (aplikasi)	1. Pengisian kuesioner dilakukan di tempat dan didampingi; 2. Diberikan penjelasan terhadap responden seobjektif mungkin; 3. Dibangunnya aplikasi pengukuran IKM

Pengukuran terhadap sasaran ketiga dengan indikator Nilai evaluasi AKIP dan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti walaupun tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dipusipda, akan tetapi IKU ini menjadi perjanjian kinerja antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan Kota Tasikmalaya.



Lanjutan analisa pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
IKU Nilai Evaluasi AKIP dan Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		Capaian %	Tahun 2016		Capaian %	Tahun 2017		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3.c	Nilai evaluasi AKIP	Kategori	-	-	-	-	-	-	CC	CC	100
3.d	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persentase	-	-	-	-	-	-	75	100	133,33
Rata-rata Capaian IKU			-			-			116,67		
Kinerja Capaian Sasaran			-			-			116,67		

Tabel diatas untuk IKU Nilai Evaluasi AKIP memperlihatkan bahwa :

1. Pada tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP karena tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Capaian kinerja untuk Nilai Evaluasi AKIP menunjukkan capaian kinerja nyata kategori CC atau sebesar 100% dari target yang diperjanjikan kategori CC sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **Sesuai Target**, dengan Hasil Evaluasi AKIP sebagai berikut :

Data Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2017

No	Komponen Pengukuran AKIP	2017
		Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	21,13
	Perencanaan Strategis	8,06
	Pemenuhan Renstra	2,00
	Kualitas Renstra	4,06
	Implementasi Renstra	2,00
	Perencanaan Kinerja Tahunan	13,07
	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	4,00
	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	6,67
	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	2,40



2.	Pengukuran Kinerja	13,65
	Pemenuhan Pengukuran	3,33
	Kualitas Pengukuran	7,81
	Implementasi Pengukuran	2,50
3.	Pelaporan Kinerja	7,89
	Pemenuhan Pelaporan	2,63
	Penyajian Informasi Kinerja	3,30
	Pemanfaatan Informasi Kinerja	1,97
4.	Evaluasi Internal	3,81
	Pemenuhan Evaluasi	0,63
	Kualitas Evaluasi	2,19
	Pemanfaatan Evaluasi	1,00
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	11,88
	Jumlah	58,36

Jika diperbandingkan dengan kategori nilai AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Perbandingan Kategori Nilai AKIP dari Kemenpan RB dengan Kinerja Dipusipda Kota Tasikmalaya Tahun 2017

No	Kategori	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Dipusipda
1	AA	➤ 85 - 100	Memuaskan	Target : CC Realisasi 58,36 (CC) Capaian IKU : 100%
2	A	➤ 75 - 85	Sangat Baik	
3	B	➤ 65 - 75	Baik, perlu sedikit perbaikan	
4	CC	➤ 50 - 65	Cukup Baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	

Tabel diatas untuk IKU Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti memperlihatkan bahwa :

1. Pada tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti karena tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Untuk indikator Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti pada tahun 2017, bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan target kinerja yang direncanakan, maka kinerja nyata telah mencapai sebesar 100% dari target yang diperjanjikan sebesar 75% dan dikategorikan **Melebihi**



Target. Hal tersebut sebagaimana disampaikan pada tahun 2017 terdapat temuan Inspektorat yang telah ditindaklanjuti, yakni :

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya telah menyampaikan tindak lanjut atas temuan/rekomendasi :

- 1) Aspek Pengelolaan Keuangan;
- 2) Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
- 3) Aspek Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

b. Berikut data jenis temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 :

No	Unsur Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi		Ditindaklanjuti	
			BPK	Inspektorat	BPK	Inspektorat
1	Kebijakan Daerah	-	-	-	-	-
2	Kelembagaan	-	-	-	-	-
3	Pengelolaan Keuangan	1	-	1	-	1
4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1	-	1	-	1
5	Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian	1	-	1	-	1
Jumlah		3	0	3	0	3

Jika diperbandingkan dengan Realisasi pencapaian indikator Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti sampai dengan tahun awal sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 3
IKU Nilai Evaluasi AKIP dan Persentase Temuan BPK/Inspektorat
yang Ditindaklanjuti Tahun 2017 dengan target Jangka Menengah
yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana sesuai dengan Renstra/Renja Tahun 2017		Capaian %	Tahun 2018		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai evaluasi AKIP	Kategori	CC	CC	100	CC	CC	100
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persentase	75	100	133,33	80	100	125

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan rencana awal Renstra pada tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja Nilai evaluasi AKIP mencapai CC/100%, sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2018, indikator Nilai evaluasi AKIP adalah kategori CC/**100%**. Sedangkan untuk capaian kinerja Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti mencapai 100%, sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2018, indikator Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti telah mencapai **125%**.

3.2.2 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Berikut adalah tabel sasaran kinerja yang telah berhasil dicapai beserta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja :

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	% Capaian	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan pengunjung perpustakaan	106,50	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca



			Program Pengembangan Sarana / Prasarana Perpustakaan	2. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
				3. Pengembangan Perpustakaan di Kota Tasikmalaya
				4. Pengembangan Perpustakaan Pemerintah Daerah di Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017)
2	Penerapan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah	283,33	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	5. Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan
				6. Penyusunan Rancangan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
				7. Penataan arsip in aktif
				8. Pembinaan kearsipan
			Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	9. Pembuatan Film Dokumenter Sejarah Kebangkitan Pergerakan di Kota Tasikmalaya 1912 -1926
3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	111,11%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				13. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
				14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
				15. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
				16. Penyediaan Alat Tulis Kantor
				17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				18. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				19. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				21. Penyediaan Makanan dan Minuman
				22. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
				23. Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
				24. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25. Pengadaan Mobil Jabatan
				26. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
				27. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



				28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
				29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
				30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
				31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				32. Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
				33. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	34. Pengadaan mesin/kartu absensi
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat
				37. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
				38. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
				39. Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
				40. Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
			Program Perencanaan Kerja	41. Penyusunan Rencana Kerja
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	43. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Arsip dan Perpustakaan

Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh 2 Program yakni Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan melalui kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.915.800,- atau 83,05% dan realisasi fisik sebesar 100% serta Program Pengembangan Sarana / Prasarana Perpustakaan melalui kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum



Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 175.782.750,- atau 97,66% dan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Kota Tasikmalaya pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 196.317.000,- atau 98,16% dan realisasi fisik sebesar 100% dan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pemerintah Daerah di Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.364.357.500,- atau 96,12% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh 2 Program yakni Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.778.000,- atau 99,68% dan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan Penyusunan Rancangan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip pagu anggaran sebesar Rp. 31.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.754.400,- atau 99,21% dan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan Penataan arsip in aktif pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.110.000,- atau 91,74% dan realisasi fisik sebesar 100% serta kegiatan Pembinaan kearsipan aktif pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.146.000,- atau 97,94% dan realisasi fisik sebesar 100% berikut Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah melalui kegiatan Pembuatan Film Dokumenter Sejarah Kebangkitan Pergerakan di Kota Tasikmalaya 1912 -1926 pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.228.000,- atau 97,23% dan realisasi fisik sebesar 100%,.

Capaian kinerja sasaran 3 didukung oleh 7 Program dan 35 Kegiatan sebagaimana tabel diatas :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pagu anggaran sebesar Rp. 586.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 572.004.521,- atau 91,59% dan realisasi fisik sebesar 100%,;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pagu anggaran sebesar Rp. 909.136.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 858.105.620,- atau 99,33% dan realisasi fisik sebesar 100%,;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.480.000,- atau 49,87% dan realisasi fisik sebesar 100%,;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur pagu anggaran sebesar Rp. 53.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.795.403,- atau 90,70% dan realisasi fisik sebesar 100%,;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur pagu anggaran sebesar Rp. 53.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.795.403,- atau 90,70% dan realisasi fisik sebesar 100%,;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pagu anggaran sebesar Rp. 12.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.188.900,- atau 97,51% dan realisasi fisik sebesar 100%,;
7. Program Perencanaan Kerja pagu anggaran sebesar Rp. 17.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.296.600,- atau 96,65% dan realisasi fisik sebesar 100%,.

3.2.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja dicapai atas dasar penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Di dalam penggunaan sumber daya tersebut, terutama anggaran, prinsip efisiensi wajib diterapkan sebagai bagian penyelenggaraan *good and clean governance*. Efisiensi



penggunaan sumber daya anggaran dihitung dengan mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Perhitungan diterapkan hanya pada kinerja dengan pencapaian lebih dari dan sama dengan 100%. Asumsi yang diterapkan adalah capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang minimal, maka efisiensi telah terjadi :

Tabel 3.11

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Peningkatan pengunjung perpustakaan	106,50%	90,18%	16,32%
2.	Penerapan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah	283,33%	97,18%	186,15%
3.	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	111,11%	88,59%	22,52%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam tahun anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.8.457.417.662,- dengan penyerapan dana sebesar Rp.8.138.056.716,- (96,22 %). Adapun besarnya pagu anggaran belanja langsung (kegiatan non-urusan dan kegiatan urusan wajib/pilihan) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 5.873.236.000,- dengan tingkat penyerapan dana sebesar Rp. 5.637.563.294,- (95,98%), Rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Peningkatan pengunjung perpustakaan	1.637.236.000	1.558.173.894	95,17%
2	Penerapan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah	326.000.000	318.016.400	97,55%
3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	3.910.000.000	3.761.373.000	96,20%
Jumlah		5.873.236.000	5.637.563.294	95,98%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah implementasi dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan, pula sebagai informasi bagi pihak-pihak terkait baik kepada stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya.

Dalam tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 3 (Tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Adapun hasil pengukuran menunjukkan kinerja yang telah dicapai dengan *range* nilai 0 – 100 yang ditunjukkan dalam warna, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Nilai Hasil Pengukuran Kinerja

Predikat	Nilai	Warna
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang



D	0-30	Sangat Kurang
---	------	---------------



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 90 – 100 bahkan melebihi target > 100 dan termasuk dalam Interpretasi Sangat Memuaskan. Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Jabar Tahun Anggaran 2017 pagu anggaran belanja langsung (kegiatan non-urusan dan kegiatan urusan wajib/pilihan) adalah sebesar Rp. 5.873.236.000,- dan tingkat penyerapan dana sebesar Rp. 5.637.563.294,- (95,98%) dengan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.235.672.706,-.

Dalam upaya peningkatan kinerja berkesinambungan, diperlukan rencana tindak lanjut di masa depan. Diantaranya adalah melalui :

1. Terus-menerus melakukan evaluasi internal dengan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya;
2. Meningkatkan manajemen kinerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya sehingga setiap personil fokus dan mempunyai tanggung jawab yang jelas melalui pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah disepakati dalam rangka pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Januari 2018

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,



Drs. H. OSLAN KHAERUL FALAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19611013 198206 1 001

